



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK

NOMOR 65 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang :
- a. Bahwa besaran Dana Desa Tahun 2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 199/PMK.07/2017 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, mengamanatkan Bupati untuk menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
 - c. bahwa untuk menetapkan rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2019 bagi Desa di wilayah Kabupaten Lebak perlu menetapkan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan

Bupati Lebak tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
7. Peraturan Menteri Keuangan nomor 199/PMK.07/2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Lebak ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

- kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
 4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka

kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Lebak

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Lebak

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Lebak

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Lebak

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Lebak

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati Lebak berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kabupaten Lebak ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke

Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah bupati/walikota menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 1. usaha pertanian untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial;
 2. penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan

diputuskan melalui musyawarah Desa.

- f. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- g. pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa setempat;
- h. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- i. pengembangan ketahanan keluarga;
- j. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu;
- k. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- l. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- m. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
- n. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
- o. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- p. pendayagunaan sumberdaya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- q. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif; m. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
- r. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melalui Musyawarah Desa dan ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan BPD.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 tahun anggaran berjalan.

- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada bupati.

BAB VI SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana

Desa.

- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
- a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran

berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 27 Desember 2018

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 27 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018 NOMOR 66

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR : 65 TAHUN 2018
 TENTANG : RINCIAN DANA DESA TAHUN
 ANGGARAN 2019.

**RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN LEBAK
 TAHUN ANGGARAN 2019**

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER-DESA
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)= (4) + (5) + (6)</i>
1	MALINGPING	CILANGKAHAN	672,421,000.0	-	70,734,000.0	743,155,000.0
2	MALINGPING	PAGELARAN	672,421,000.0	-	99,954,000.0	772,375,000.0
3	MALINGPING	SUKARAJA	672,421,000.0	-	134,961,000.0	807,382,000.0
4	MALINGPING	MALINGPING UTARA				

			672,421,000.0	-	69,901,000.0	742,322,000.0
5	MALINGPING	BOLANG	672,421,000.0	-	92,965,000.0	765,386,000.0
6	MALINGPING	CIPEUNDEUY	672,421,000.0	-	94,805,000.0	767,226,000.0
7	MALINGPING	RAHONG	672,421,000.0	-	97,180,000.0	769,601,000.0
8	MALINGPING	KADUJAJAR	672,421,000.0	-	96,636,000.0	769,057,000.0
9	MALINGPING	KERSARATU	672,421,000.0	-	257,287,000.0	929,708,000.0
10	MALINGPING	MALINGPING SELATAN	672,421,000.0	-	54,350,000.0	726,771,000.0
11	MALINGPING	SUMBERWARAS	672,421,000.0	-	138,732,000.0	811,153,000.0
12	MALINGPING	SUKAMANAH	672,421,000.0	-	154,760,000.0	827,181,000.0
13	MALINGPING	SENGHATI	672,421,000.0	-	98,316,000.0	770,737,000.0
14	MALINGPING	SANGIANG	672,421,000.0	-	65,645,000.0	738,066,000.0
15	PANGGARANGAN	PANGGARANGAN	672,421,000.0	-	92,496,000.0	764,917,000.0
16	PANGGARANGAN	JATAKE	672,421,000.0	-	105,607,000.0	778,028,000.0
17	PANGGARANGAN	SOGONG	672,421,000.0	-	141,983,000.0	814,404,000.0
18	PANGGARANGAN	CIMANDIRI	672,421,000.0	-	101,574,000.0	773,995,000.0

19	PANGGARANGAN	GUNUNGGEDE	672,421,000.0	-	139,285,000.0	811,706,000.0
20	PANGGARANGAN	SITUREGEN	672,421,000.0	-	98,129,000.0	770,550,000.0
21	PANGGARANGAN	MEKARJAYA	672,421,000.0	-	79,078,000.0	751,499,000.0
22	PANGGARANGAN	SINDANGRATU	672,421,000.0	211,289,000.0	513,797,000.0	1,397,507,000.0
23	PANGGARANGAN	HEGARMANAH	672,421,000.0	-	76,000,000.0	748,421,000.0
24	PANGGARANGAN	SUKAJADI	672,421,000.0	-	97,829,000.0	770,250,000.0
25	PANGGARANGAN	CIBARENGKOK	672,421,000.0	211,289,000.0	659,463,000.0	1,543,173,000.0
26	BAYAH	BAYAH BARAT	672,421,000.0	-	78,336,000.0	750,757,000.0
27	BAYAH	SAWARNA	672,421,000.0	-	99,364,000.0	771,785,000.0
28	BAYAH	CIDIKIT	672,421,000.0	211,289,000.0	554,453,000.0	1,438,163,000.0
29	BAYAH	SUWAKAN	672,421,000.0	-	73,060,000.0	745,481,000.0
30	BAYAH	CIMANCAK	672,421,000.0	-	158,026,000.0	830,447,000.0
31	BAYAH	DARMASARI	672,421,000.0	-	65,539,000.0	737,960,000.0
32	BAYAH	BAYAH TIMUR	672,421,000.0	-	76,762,000.0	749,183,000.0
33	BAYAH	CISUREN				

			672,421,000.0	-	96,392,000.0	768,813,000.0
34	BAYAH	PASIRGOMBONG	672,421,000.0	-	69,752,000.0	742,173,000.0
35	BAYAH	SAWARNA TIMUR	672,421,000.0	-	298,357,000.0	970,778,000.0
36	BAYAH	PAMUBULAN	672,421,000.0	211,289,000.0	365,385,000.0	1,249,095,000.0
37	CIPANAS	CIPANAS	672,421,000.0	-	67,021,000.0	739,442,000.0
38	CIPANAS	GIRILAYA	672,421,000.0	-	100,243,000.0	772,664,000.0
39	CIPANAS	MALANGSARI	672,421,000.0	211,289,000.0	416,365,000.0	1,300,075,000.0
40	CIPANAS	BINTANGRESMI	672,421,000.0	-	50,647,000.0	723,068,000.0
41	CIPANAS	TALAGAHYANG	672,421,000.0	-	52,484,000.0	724,905,000.0
42	CIPANAS	LUHURJAYA	672,421,000.0	-	77,393,000.0	749,814,000.0
43	CIPANAS	HAURGAJRUG	672,421,000.0	-	81,191,000.0	753,612,000.0
44	CIPANAS	GIRIHARJA	672,421,000.0	-	71,642,000.0	744,063,000.0
45	CIPANAS	SUKASARI	672,421,000.0	211,289,000.0	759,091,000.0	1,642,801,000.0
46	CIPANAS	JAYAPURA	672,421,000.0	-	94,361,000.0	766,782,000.0
47	CIPANAS	SIPAYUNG	672,421,000.0	-	252,395,000.0	924,816,000.0

48	CIPANAS	BINTANGSARI	672,421,000.0	-	61,310,000.0	733,731,000.0
49	CIPANAS	PASIRHAUR	672,421,000.0	211,289,000.0	202,936,000.0	1,086,646,000.0
50	CIPANAS	HARUMSARI	672,421,000.0	-	72,257,000.0	744,678,000.0
51	MUNCANG	PASIREURIH	672,421,000.0	-	118,734,000.0	791,155,000.0
52	MUNCANG	CIMINYAK	672,421,000.0	-	62,930,000.0	735,351,000.0
53	MUNCANG	MUNCANG	672,421,000.0	-	74,463,000.0	746,884,000.0
54	MUNCANG	LEUWICOO	672,421,000.0	-	82,185,000.0	754,606,000.0
55	MUNCANG	SINDANGWANGI	672,421,000.0	-	88,873,000.0	761,294,000.0
56	MUNCANG	CIKARANG	672,421,000.0	-	73,647,000.0	746,068,000.0
57	MUNCANG	SUKANAGARA	672,421,000.0	-	68,575,000.0	740,996,000.0
58	MUNCANG	PASIRNANGKA	672,421,000.0	-	79,298,000.0	751,719,000.0
59	MUNCANG	JAGARAKSA	672,421,000.0	-	84,922,000.0	757,343,000.0
60	MUNCANG	TANJUNGWANGI	672,421,000.0	-	85,650,000.0	758,071,000.0
61	MUNCANG	MEKARWANGI	672,421,000.0	-	83,067,000.0	755,488,000.0
62	MUNCANG	GIRIJAGABAYA				

			672,421,000.0	-	82,521,000.0	754,942,000.0
63	LEUWIDAMAR	KANEKES	672,421,000.0	422,578,000.0	1,183,348,000.0	2,278,347,000.0
64	LEUWIDAMAR	CISIMEUT	672,421,000.0	-	108,214,000.0	780,635,000.0
65	LEUWIDAMAR	CIBUNGUR	672,421,000.0	-	87,802,000.0	760,223,000.0
66	LEUWIDAMAR	LEUWIDAMAR	672,421,000.0	-	893,413,000.0	1,565,834,000.0
67	LEUWIDAMAR	LEBAKPARAHANG	672,421,000.0	-	73,205,000.0	745,626,000.0
68	LEUWIDAMAR	SANGKANWANGI	672,421,000.0	-	121,525,000.0	793,946,000.0
69	LEUWIDAMAR	NAYAGATI	672,421,000.0	-	134,289,000.0	806,710,000.0
70	LEUWIDAMAR	BOJONGMENTENG	672,421,000.0	-	83,930,000.0	756,351,000.0
71	LEUWIDAMAR	MARGAWANGI	672,421,000.0	-	70,629,000.0	743,050,000.0
72	LEUWIDAMAR	WANTISARI	672,421,000.0	-	75,531,000.0	747,952,000.0
73	LEUWIDAMAR	JALUPANGMULYA	672,421,000.0	-	98,319,000.0	770,740,000.0
74	LEUWIDAMAR	CISIMEUT RAYA	672,421,000.0	-	126,686,000.0	799,107,000.0
75	BOJONGMANIK	BOJONGMANIK	672,421,000.0	-	65,390,000.0	737,811,000.0
76	BOJONGMANIK	HARJAWANA	672,421,000.0	-	62,154,000.0	734,575,000.0

77	BOJONGMANIK	KADURAHAYU	672,421,000.0	211,289,000.0	482,634,000.0	1,366,344,000.0
78	BOJONGMANIK	CIMAYANG	672,421,000.0	-	88,162,000.0	760,583,000.0
79	BOJONGMANIK	PARAKANBEUSI	672,421,000.0	-	88,627,000.0	761,048,000.0
80	BOJONGMANIK	KEBONCAU	672,421,000.0	-	96,237,000.0	768,658,000.0
81	BOJONGMANIK	MEKARMANIK	672,421,000.0	422,578,000.0	189,149,000.0	1,284,148,000.0
82	BOJONGMANIK	MEKAR RAHAYU	672,421,000.0	-	72,614,000.0	745,035,000.0
83	BOJONGMANIK	PASIRBITUNG	672,421,000.0	211,289,000.0	314,457,000.0	1,198,167,000.0
84	GUNUNGKENCANA	GUNUNGKENCANA	672,421,000.0	-	71,998,000.0	744,419,000.0
85	GUNUNGKENCANA	CIMANYANGRAY	672,421,000.0	-	88,170,000.0	760,591,000.0
86	GUNUNGKENCANA	GUNUNGKENDENG	672,421,000.0	-	61,092,000.0	733,513,000.0
87	GUNUNGKENCANA	CISAMPANG	672,421,000.0	-	112,562,000.0	784,983,000.0
88	GUNUNGKENCANA	CIGINGGANG	672,421,000.0	-	140,060,000.0	812,481,000.0
89	GUNUNGKENCANA	CIAKAR	672,421,000.0	-	97,123,000.0	769,544,000.0
90	GUNUNGKENCANA	CICARINGIN	672,421,000.0	-	94,840,000.0	767,261,000.0
91	GUNUNGKENCANA	BULAKAN				

			672,421,000.0	-	84,043,000.0	756,464,000.0
92	GUNUNGKENCANA	SUKANEGARA	672,421,000.0	-	68,701,000.0	741,122,000.0
93	GUNUNGKENCANA	BOJONGKONENG	672,421,000.0	-	86,439,000.0	758,860,000.0
94	GUNUNGKENCANA	KRAMATJAYA	672,421,000.0	-	101,560,000.0	773,981,000.0
95	GUNUNGKENCANA	TANJUNGSARI INDAH	672,421,000.0	-	127,320,000.0	799,741,000.0
96	BANJARSARI	KERTA	672,421,000.0	-	376,011,000.0	1,048,432,000.0
97	BANJARSARI	BOJONGJURUH	672,421,000.0	-	80,475,000.0	752,896,000.0
98	BANJARSARI	LEUWIIPUH	672,421,000.0	-	64,894,000.0	737,315,000.0
99	BANJARSARI	LEBAKKEUSIK	672,421,000.0	-	67,520,000.0	739,941,000.0
100	BANJARSARI	CILEGONGILIR	672,421,000.0	-	61,004,000.0	733,425,000.0
101	BANJARSARI	KEUSIK	672,421,000.0	-	93,992,000.0	766,413,000.0
102	BANJARSARI	CIBATURKEUSIK	672,421,000.0	-	68,673,000.0	741,094,000.0
103	BANJARSARI	KUMPAY	672,421,000.0	-	100,578,000.0	772,999,000.0
104	BANJARSARI	JALUPANGGIRANG	672,421,000.0	-	98,928,000.0	771,349,000.0
105	BANJARSARI	BENDUNGAN	672,421,000.0	-	87,382,000.0	759,803,000.0

106	BANJARSARI	KERTARAHARJA	672,421,000.0	-	174,526,000.0	846,947,000.0
107	BANJARSARI	CISAMPIH	672,421,000.0	-	85,457,000.0	757,878,000.0
108	BANJARSARI	GUNUNGSARI	672,421,000.0	-	87,115,000.0	759,536,000.0
109	BANJARSARI	TAMANSARI	672,421,000.0	-	63,333,000.0	735,754,000.0
110	BANJARSARI	CIDAHU	672,421,000.0	-	61,215,000.0	733,636,000.0
111	BANJARSARI	CIRUJI	672,421,000.0	211,289,000.0	502,176,000.0	1,385,886,000.0
112	BANJARSARI	KADUHAUK	672,421,000.0	-	105,673,000.0	778,094,000.0
113	BANJARSARI	LABANJAYA	672,421,000.0	-	95,928,000.0	768,349,000.0
114	BANJARSARI	UMBULJAYA	672,421,000.0	-	93,135,000.0	765,556,000.0
115	BANJARSARI	KERTARAHAYU	672,421,000.0	-	105,631,000.0	778,052,000.0
116	CILELES	PASINDANGAN	672,421,000.0	211,289,000.0	647,437,000.0	1,531,147,000.0
117	CILELES	PARUNGKUJANG	672,421,000.0	-	165,119,000.0	837,540,000.0
118	CILELES	CILELES	672,421,000.0	-	67,222,000.0	739,643,000.0
119	CILELES	CIKAREO	672,421,000.0	-	493,562,000.0	1,165,983,000.0
120	CILELES	CIPADANG				

			672,421,000.0	-	96,381,000.0	768,802,000.0
121	CILELES	GUMURUH	672,421,000.0	-	146,072,000.0	818,493,000.0
122	CILELES	PRABUGANTUNGAN	672,421,000.0	-	78,476,000.0	750,897,000.0
123	CILELES	DAROYON	672,421,000.0	-	100,710,000.0	773,131,000.0
124	CILELES	MARGAMULYA	672,421,000.0	-	96,722,000.0	769,143,000.0
125	CILELES	MEKARJAYA	672,421,000.0	-	109,284,000.0	781,705,000.0
126	CILELES	KUJANGSARI	672,421,000.0	211,289,000.0	348,534,000.0	1,232,244,000.0
127	CILELES	BANJARSARI	672,421,000.0	-	91,227,000.0	763,648,000.0
128	CIMARGA	SARAGENI	672,421,000.0	-	74,488,000.0	746,909,000.0
129	CIMARGA	GUNUNGANTEN	672,421,000.0	-	104,463,000.0	776,884,000.0
130	CIMARGA	SUDAMANIK	672,421,000.0	-	84,043,000.0	756,464,000.0
131	CIMARGA	TAMBAK	672,421,000.0	-	178,277,000.0	850,698,000.0
132	CIMARGA	CIMARGA	672,421,000.0	-	69,468,000.0	741,889,000.0
133	CIMARGA	KARYAJAYA	672,421,000.0	-	115,960,000.0	788,381,000.0
134	CIMARGA	MARGAJAYA	672,421,000.0	-	90,843,000.0	763,264,000.0

135	CIMARGA	JAYAMANIK	672,421,000.0	-	116,308,000.0	788,729,000.0
136	CIMARGA	MARGALUYU	672,421,000.0	-	87,271,000.0	759,692,000.0
137	CIMARGA	MARGATIRTA	672,421,000.0	-	95,527,000.0	767,948,000.0
138	CIMARGA	INTENJAYA	672,421,000.0	-	170,254,000.0	842,675,000.0
139	CIMARGA	MEKARJAYA	672,421,000.0	-	152,480,000.0	824,901,000.0
140	CIMARGA	JAYASARI	672,421,000.0	-	64,715,000.0	737,136,000.0
141	CIMARGA	GIRIMUKTI	672,421,000.0	-	61,865,000.0	734,286,000.0
142	CIMARGA	SANGKANMANIK	672,421,000.0	211,289,000.0	486,318,000.0	1,370,028,000.0
143	CIMARGA	SANGIANGJAYA	672,421,000.0	-	102,818,000.0	775,239,000.0
144	CIMARGA	MEKARMULYA	672,421,000.0	-	107,515,000.0	779,936,000.0
145	SAJIRA	MARAYA	672,421,000.0	211,289,000.0	182,299,000.0	1,066,009,000.0
146	SAJIRA	SAJIRA	672,421,000.0	-	520,403,000.0	1,192,824,000.0
147	SAJIRA	SUKARAME	672,421,000.0	-	86,769,000.0	759,190,000.0
148	SAJIRA	CALUNGBUNGUR	672,421,000.0	-	83,308,000.0	755,729,000.0
149	SAJIRA	PARUNGSARI				

			672,421,000.0	-	64,264,000.0	736,685,000.0
150	SAJIRA	SINDANGSARI	672,421,000.0	-	105,902,000.0	778,323,000.0
151	SAJIRA	MEKARSARI	672,421,000.0	-	74,533,000.0	746,954,000.0
152	SAJIRA	SUKAMARGA	672,421,000.0	-	90,894,000.0	763,315,000.0
153	SAJIRA	PAJAGAN	672,421,000.0	-	72,857,000.0	745,278,000.0
154	SAJIRA	SUKAJAYA	672,421,000.0	-	79,672,000.0	752,093,000.0
155	SAJIRA	SAJIRA MEKAR	672,421,000.0	-	78,729,000.0	751,150,000.0
156	SAJIRA	PAJA	672,421,000.0	-	77,018,000.0	749,439,000.0
157	SAJIRA	MARGALUYU	672,421,000.0	-	185,189,000.0	857,610,000.0
158	SAJIRA	BUNGURMEKAR	672,421,000.0	211,289,000.0	603,080,000.0	1,486,790,000.0
159	SAJIRA	CIUYAH	672,421,000.0	-	67,461,000.0	739,882,000.0
160	MAJA	TANJUNGSARI	672,421,000.0	-	109,976,000.0	782,397,000.0
161	MAJA	MAJA	672,421,000.0	-	1,101,521,000.0	1,773,942,000.0
162	MAJA	SANGIANG	672,421,000.0	-	73,992,000.0	746,413,000.0
163	MAJA	BINONG	672,421,000.0	-	80,172,000.0	752,593,000.0

164	MAJA	GUBUGAN CIBEUREUM	672,421,000.0	-	71,681,000.0	744,102,000.0
165	MAJA	MEKARSARI	672,421,000.0	-	72,173,000.0	744,594,000.0
166	MAJA	PADASUKA	672,421,000.0	-	143,326,000.0	815,747,000.0
167	MAJA	CURUGBADAK	672,421,000.0	-	83,101,000.0	755,522,000.0
168	MAJA	SINDANGMULYA	672,421,000.0	-	75,261,000.0	747,682,000.0
169	MAJA	CILANGKAP	672,421,000.0	-	83,103,000.0	755,524,000.0
170	MAJA	PASIRKEMBANG	672,421,000.0	-	67,619,000.0	740,040,000.0
171	MAJA	PASIRKECAPI	672,421,000.0	211,289,000.0	1,048,879,000.0	1,932,589,000.0
172	MAJA	BUYUT MEKAR	672,421,000.0	-	68,208,000.0	740,629,000.0
173	MAJA	MAJA BARU	672,421,000.0	-	54,041,000.0	726,462,000.0
174	RANGKASBITUNG	PASIRTANJUNG	672,421,000.0	-	93,174,000.0	765,595,000.0
175	RANGKASBITUNG	CITERAS	672,421,000.0	-	738,510,000.0	1,410,931,000.0
176	RANGKASBITUNG	NAMENG	672,421,000.0	-	95,043,000.0	767,464,000.0
177	RANGKASBITUNG	KOLELET WETAN	672,421,000.0	-	60,743,000.0	733,164,000.0
178	RANGKASBITUNG	JATIMULYA				

			672,421,000.0	-	70,362,000.0	742,783,000.0
179	RANGKASBITUNG	MEKARSARI	672,421,000.0	-	62,512,000.0	734,933,000.0
180	RANGKASBITUNG	PABUARAN	672,421,000.0	-	77,253,000.0	749,674,000.0
181	RANGKASBITUNG	RANGKASBITUNG TIMUR	672,421,000.0	-	95,368,000.0	767,789,000.0
182	RANGKASBITUNG	SUKAMANAH	672,421,000.0	-	89,732,000.0	762,153,000.0
183	RANGKASBITUNG	CIMANGEUNTEUNG	672,421,000.0	-	80,839,000.0	753,260,000.0
184	RANGKASBITUNG	NARIMBANG MULIA	672,421,000.0	-	70,027,000.0	742,448,000.0
185	WARUNGGUNUNG	SUKARENDAH	672,421,000.0	-	78,270,000.0	750,691,000.0
186	WARUNGGUNUNG	WARUNGGUNUNG	672,421,000.0	-	64,380,000.0	736,801,000.0
187	WARUNGGUNUNG	CIBUAH	672,421,000.0	-	74,810,000.0	747,231,000.0
188	WARUNGGUNUNG	PASIR TANGKIL	672,421,000.0	-	54,403,000.0	726,824,000.0
189	WARUNGGUNUNG	BAROS	672,421,000.0	-	52,854,000.0	725,275,000.0
190	WARUNGGUNUNG	BANJARSARI	672,421,000.0	-	81,356,000.0	753,777,000.0
191	WARUNGGUNUNG	PADASUKA	672,421,000.0	-	91,642,000.0	764,063,000.0
192	WARUNGGUNUNG	SUKARAJA	672,421,000.0	-	100,240,000.0	772,661,000.0

193	WARUNGGUNUNG	JAGABAYA	672,421,000.0	-	63,262,000.0	735,683,000.0
194	WARUNGGUNUNG	SELARAJA	672,421,000.0	-	70,213,000.0	742,634,000.0
195	WARUNGGUNUNG	CEMPAKA	672,421,000.0	-	64,099,000.0	736,520,000.0
196	WARUNGGUNUNG	SINDANGSARI	672,421,000.0	-	53,110,000.0	725,531,000.0
197	CIJAKU	MEKARJAYA	672,421,000.0	-	89,877,000.0	762,298,000.0
198	CIJAKU	CIPALABUH	672,421,000.0	-	109,046,000.0	781,467,000.0
199	CIJAKU	CIJAKU	672,421,000.0	-	87,404,000.0	759,825,000.0
200	CIJAKU	CIBEUREUM	672,421,000.0	-	142,216,000.0	814,637,000.0
201	CIJAKU	CIAPUS	672,421,000.0	-	112,606,000.0	785,027,000.0
202	CIJAKU	KANDANGSAPI	672,421,000.0	-	119,800,000.0	792,221,000.0
203	CIJAKU	CIHUJAN	672,421,000.0	-	131,560,000.0	803,981,000.0
204	CIJAKU	CIMENGA	672,421,000.0	-	142,380,000.0	814,801,000.0
205	CIJAKU	KAPUNDUHAN	672,421,000.0	-	108,222,000.0	780,643,000.0
206	CIJAKU	SUKASENANG	672,421,000.0	-	115,952,000.0	788,373,000.0
207	CIKULUR	ANGGALAN				

			672,421,000.0	-	90,197,000.0	762,618,000.0
208	CIKULUR	MUNCANGKOPONG	672,421,000.0	-	74,318,000.0	746,739,000.0
209	CIKULUR	SUKAHARJA	672,421,000.0	-	71,422,000.0	743,843,000.0
210	CIKULUR	TAMANJAYA	672,421,000.0	-	57,883,000.0	730,304,000.0
211	CIKULUR	CIGOONG UTARA	672,421,000.0	211,289,000.0	1,075,923,000.0	1,959,633,000.0
212	CIKULUR	MUARADUA	672,421,000.0	-	97,834,000.0	770,255,000.0
213	CIKULUR	CIKULUR	672,421,000.0	211,289,000.0	1,665,089,000.0	2,548,799,000.0
214	CIKULUR	CURUGPANJANG	672,421,000.0	-	83,622,000.0	756,043,000.0
215	CIKULUR	CIGOONG SELATAN	672,421,000.0	-	64,974,000.0	737,395,000.0
216	CIKULUR	SUMURBANDUNG	672,421,000.0	-	107,837,000.0	780,258,000.0
217	CIKULUR	PARAGE	672,421,000.0	211,289,000.0	555,145,000.0	1,438,855,000.0
218	CIKULUR	SUKADAYA	672,421,000.0	-	115,048,000.0	787,469,000.0
219	CIKULUR	PASIRGINTUNG	672,421,000.0	-	84,232,000.0	756,653,000.0
220	CIBADAK	TAMBAKBAYA	672,421,000.0	-	121,587,000.0	794,008,000.0
221	CIBADAK	KADUAGUNG TIMUR	672,421,000.0	-	56,410,000.0	728,831,000.0

222	CIBADAK	PANANCANGAN	672,421,000.0	-	52,389,000.0	724,810,000.0
223	CIBADAK	CIBADAK	672,421,000.0	-	66,830,000.0	739,251,000.0
224	CIBADAK	ASEM	672,421,000.0	-	61,727,000.0	734,148,000.0
225	CIBADAK	CISANGU	672,421,000.0	-	82,180,000.0	754,601,000.0
226	CIBADAK	KADUAGUNG BARAT	672,421,000.0	-	57,345,000.0	729,766,000.0
227	CIBADAK	BOJONGCAE	672,421,000.0	211,289,000.0	546,814,000.0	1,430,524,000.0
228	CIBADAK	MALABAR	672,421,000.0	-	67,854,000.0	740,275,000.0
229	CIBADAK	PASAR KEONG	672,421,000.0	-	59,191,000.0	731,612,000.0
230	CIBADAK	BOJONG LELES	672,421,000.0	211,289,000.0	875,999,000.0	1,759,709,000.0
231	CIBADAK	CIMENTENG JAYA	672,421,000.0	211,289,000.0	504,979,000.0	1,388,689,000.0
232	CIBADAK	MEKAR AGUNG	672,421,000.0	-	59,500,000.0	731,921,000.0
233	CIBADAK	ASEM MARGALUYU	672,421,000.0	-	91,200,000.0	763,621,000.0
234	CIBADAK	KADUAGUNG TENGAH	672,421,000.0	-	130,998,000.0	803,419,000.0
235	CIBEBER	CIBEBER	672,421,000.0	-	266,098,000.0	938,519,000.0
236	CIBEBER	CITOREK TENGAH				

			672,421,000.0	-	108,671,000.0	781,092,000.0
237	CIBEBER	CISUNGSANG	672,421,000.0	-	77,481,000.0	749,902,000.0
238	CIBEBER	KUJANGJAYA	672,421,000.0	-	64,103,000.0	736,524,000.0
239	CIBEBER	KUJANGSARI	672,421,000.0	-	113,859,000.0	786,280,000.0
240	CIBEBER	NEGLASARI	672,421,000.0	-	101,406,000.0	773,827,000.0
241	CIBEBER	MEKARSARI	672,421,000.0	-	91,272,000.0	763,693,000.0
242	CIBEBER	CIKOTOK	672,421,000.0	-	104,864,000.0	777,285,000.0
243	CIBEBER	SUKAMULYA	672,421,000.0	-	81,183,000.0	753,604,000.0
244	CIBEBER	CITOREK TIMUR	672,421,000.0	-	111,920,000.0	784,341,000.0
245	CIBEBER	WARUNGBANTEN	672,421,000.0	-	79,929,000.0	752,350,000.0
246	CIBEBER	HEGARMANAH	672,421,000.0	-	81,520,000.0	753,941,000.0
247	CIBEBER	SITUMULYA	672,421,000.0	-	113,583,000.0	786,004,000.0
248	CIBEBER	CITOREK KIDUL	672,421,000.0	-	102,023,000.0	774,444,000.0
249	CIBEBER	CIKADU	672,421,000.0	-	89,277,000.0	761,698,000.0
250	CIBEBER	SIRNAGALIH	672,421,000.0	-	103,125,000.0	775,546,000.0

251	CIBEBER	CIHAMBALI	672,421,000.0	-	103,054,000.0	775,475,000.0
252	CIBEBER	CITOREK BARAT	672,421,000.0	-	130,568,000.0	802,989,000.0
253	CIBEBER	GUNUNGWANGUN	672,421,000.0	-	77,309,000.0	749,730,000.0
254	CIBEBER	WANASARI	672,421,000.0	-	117,669,000.0	790,090,000.0
255	CIBEBER	CITOREK SABRANG	672,421,000.0	-	107,974,000.0	780,395,000.0
256	CIBEBER	CIHERANG	672,421,000.0	-	66,177,000.0	738,598,000.0
257	CILOGRANG	CILOGRANG	672,421,000.0	-	78,959,000.0	751,380,000.0
258	CILOGRANG	CIBARENO	672,421,000.0	-	62,833,000.0	735,254,000.0
259	CILOGRANG	CIKAMUNDING	672,421,000.0	211,289,000.0	420,086,000.0	1,303,796,000.0
260	CILOGRANG	CIJENGKOL	672,421,000.0	-	115,261,000.0	787,682,000.0
261	CILOGRANG	PASIRBUNGUR	672,421,000.0	-	185,959,000.0	858,380,000.0
262	CILOGRANG	LEBAKTIPAR	672,421,000.0	-	76,031,000.0	748,452,000.0
263	CILOGRANG	CIKATOMAS	672,421,000.0	-	83,350,000.0	755,771,000.0
264	CILOGRANG	GIRIMUKTI	672,421,000.0	211,289,000.0	382,839,000.0	1,266,549,000.0
265	CILOGRANG	CIREUNDEU				

			672,421,000.0	422,578,000.0	236,041,000.0	1,331,040,000.0
266	CILOGRANG	GUNUNGBATU	672,421,000.0	-	53,001,000.0	725,422,000.0
267	WANASALAM	WANASALAM	672,421,000.0	-	110,711,000.0	783,132,000.0
268	WANASALAM	BEJOD	672,421,000.0	-	110,936,000.0	783,357,000.0
269	WANASALAM	CILANGKAP	672,421,000.0	-	97,246,000.0	769,667,000.0
270	WANASALAM	CIPEUCANG	672,421,000.0	-	82,808,000.0	755,229,000.0
271	WANASALAM	MUARA	672,421,000.0	-	129,951,000.0	802,372,000.0
272	WANASALAM	PARUNGPANJANG	672,421,000.0	-	131,276,000.0	803,697,000.0
273	WANASALAM	CIKEUSIK	672,421,000.0	-	79,607,000.0	752,028,000.0
274	WANASALAM	KATAPANG	672,421,000.0	-	132,149,000.0	804,570,000.0
275	WANASALAM	CISARAP	672,421,000.0	-	86,546,000.0	758,967,000.0
276	WANASALAM	SUKATANI	672,421,000.0	-	160,707,000.0	833,128,000.0
277	WANASALAM	CIPEDANG	672,421,000.0	-	85,516,000.0	757,937,000.0
278	WANASALAM	PARUNGSARI	672,421,000.0	-	123,332,000.0	795,753,000.0
279	WANASALAM	KARANGPAMINDANGAN	672,421,000.0	-	154,166,000.0	826,587,000.0

280	SOBANG	CIPARASI	672,421,000.0	-	84,952,000.0	757,373,000.0
281	SOBANG	SOBANG	672,421,000.0	-	97,058,000.0	769,479,000.0
282	SOBANG	SUKAJAYA	672,421,000.0	-	79,644,000.0	752,065,000.0
283	SOBANG	SINDANGLAYA	672,421,000.0	-	84,447,000.0	756,868,000.0
284	SOBANG	SUKAMAJU	672,421,000.0	-	104,516,000.0	776,937,000.0
285	SOBANG	HARIANG	672,421,000.0	-	131,499,000.0	803,920,000.0
286	SOBANG	MAJASARI	672,421,000.0	-	152,734,000.0	825,155,000.0
287	SOBANG	SINAR JAYA	672,421,000.0	-	108,540,000.0	780,961,000.0
288	SOBANG	CIROMPANG	672,421,000.0	-	76,537,000.0	748,958,000.0
289	SOBANG	SUKARESMI	672,421,000.0	-	112,703,000.0	785,124,000.0
290	CURUG BITUNG	GURADOG	672,421,000.0	-	98,160,000.0	770,581,000.0
291	CURUG BITUNG	CURUGBITUNG	672,421,000.0	211,289,000.0	659,463,000.0	1,543,173,000.0
292	CURUG BITUNG	CANDI	672,421,000.0	-	58,534,000.0	730,955,000.0
293	CURUG BITUNG	MAYAK	672,421,000.0	-	64,381,000.0	736,802,000.0
294	CURUG BITUNG	CIPINING				

			672,421,000.0	-	77,721,000.0	750,142,000.0
295	CURUG BITUNG	CILAYANG	672,421,000.0	-	72,984,000.0	745,405,000.0
296	CURUG BITUNG	CIBURUY	672,421,000.0	-	71,606,000.0	744,027,000.0
297	CURUG BITUNG	SEKARWANGI	672,421,000.0	-	79,075,000.0	751,496,000.0
298	CURUG BITUNG	CIDADAP	672,421,000.0	-	86,409,000.0	758,830,000.0
299	CURUG BITUNG	LEBAKASIH	672,421,000.0	-	90,734,000.0	763,155,000.0
300	KALANGANYAR	KALANGANYAR	672,421,000.0	-	63,610,000.0	736,031,000.0
301	KALANGANYAR	PASIRKUPA	672,421,000.0	-	145,223,000.0	817,644,000.0
302	KALANGANYAR	CILANGKAP	672,421,000.0	-	63,071,000.0	735,492,000.0
303	KALANGANYAR	AWEH	672,421,000.0	-	59,944,000.0	732,365,000.0
304	KALANGANYAR	SANGIANGTANJUNG	672,421,000.0	-	161,396,000.0	833,817,000.0
305	KALANGANYAR	SUKAMEKARSARI	672,421,000.0	-	58,222,000.0	730,643,000.0
306	KALANGANYAR	CIKATAPIS	672,421,000.0	211,289,000.0	375,567,000.0	1,259,277,000.0
307	LEBAKGEDONG	BANJARIRIGASI	672,421,000.0	-	112,415,000.0	784,836,000.0
308	LEBAKGEDONG	CILADAEUN	672,421,000.0	-	82,361,000.0	754,782,000.0

309	LEBAKGEDONG	LEBAKGEDONG	672,421,000.0	-	92,756,000.0	765,177,000.0
310	LEBAKGEDONG	BANJARSARI	672,421,000.0	-	65,508,000.0	737,929,000.0
311	LEBAKGEDONG	LEBAKSITU	672,421,000.0	-	85,096,000.0	757,517,000.0
312	LEBAKGEDONG	LEBAKSANGKA	672,421,000.0	-	87,875,000.0	760,296,000.0
313	CIHARA	PANYAUNGAN	672,421,000.0	-	98,611,000.0	771,032,000.0
314	CIHARA	CIHARA	672,421,000.0	-	73,154,000.0	745,575,000.0
315	CIHARA	CIPARAHU	672,421,000.0	-	108,363,000.0	780,784,000.0
316	CIHARA	PONDOKPANJANG	672,421,000.0	-	100,983,000.0	773,404,000.0
317	CIHARA	CITEUPUSEUN	672,421,000.0	-	76,369,000.0	748,790,000.0
318	CIHARA	LEBAKPEUNDEUY	672,421,000.0	-	109,905,000.0	782,326,000.0
319	CIHARA	MEKARSARI	672,421,000.0	-	110,068,000.0	782,489,000.0
320	CIHARA	KARANGKAMULYAN	672,421,000.0	211,289,000.0	324,971,000.0	1,208,681,000.0
321	CIHARA	BARUNAI	672,421,000.0	-	126,009,000.0	798,430,000.0
322	CIRINTEN	DATARCAE	672,421,000.0	-	83,005,000.0	755,426,000.0
323	CIRINTEN	CIRINTEN				

			672,421,000.0	-	111,588,000.0	784,009,000.0
324	CIRINTEN	KARANGNUNGGAL	672,421,000.0	-	55,905,000.0	728,326,000.0
325	CIRINTEN	KADUDAMAS	672,421,000.0	-	90,014,000.0	762,435,000.0
326	CIRINTEN	BADUR	672,421,000.0	-	86,275,000.0	758,696,000.0
327	CIRINTEN	PARAKANLIMA	672,421,000.0	-	118,575,000.0	790,996,000.0
328	CIRINTEN	NANGGERANG	672,421,000.0	-	100,806,000.0	773,227,000.0
329	CIRINTEN	CEMPAKA	672,421,000.0	-	80,710,000.0	753,131,000.0
330	CIRINTEN	KAROYA	672,421,000.0	-	73,327,000.0	745,748,000.0
331	CIRINTEN	CIBARANI	672,421,000.0	-	76,276,000.0	748,697,000.0
332	CIGEMBLONG	PEUCANGPARI	672,421,000.0	-	95,924,000.0	768,345,000.0
333	CIGEMBLONG	CIBUNGUR	672,421,000.0	-	86,456,000.0	758,877,000.0
334	CIGEMBLONG	MUGIJAYA	672,421,000.0	422,578,000.0	251,463,000.0	1,346,462,000.0
335	CIGEMBLONG	CIKATE	672,421,000.0	422,578,000.0	338,136,000.0	1,433,135,000.0
336	CIGEMBLONG	CIGEMBLONG	672,421,000.0	-	95,325,000.0	767,746,000.0
337	CIGEMBLONG	CIKADONGDONG	672,421,000.0	-	116,366,000.0	788,787,000.0

338	CIGEMBLONG	CIKARET	672,421,000.0	-	95,122,000.0	767,543,000.0
339	CIGEMBLONG	WANGUNJAYA	672,421,000.0	-	132,271,000.0	804,692,000.0
340	CIJAKU	CIKARATUAN	672,421,000.0	-	117,871,000.0	790,292,000.0
JUMLAH			228,623,140,000.0	7,817,693,000.0	50,314,510,000.0	286,755,343,000.0

BUPATI LEBAK,
Ttd
ITI OCTAVIA JAYABAYA